

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

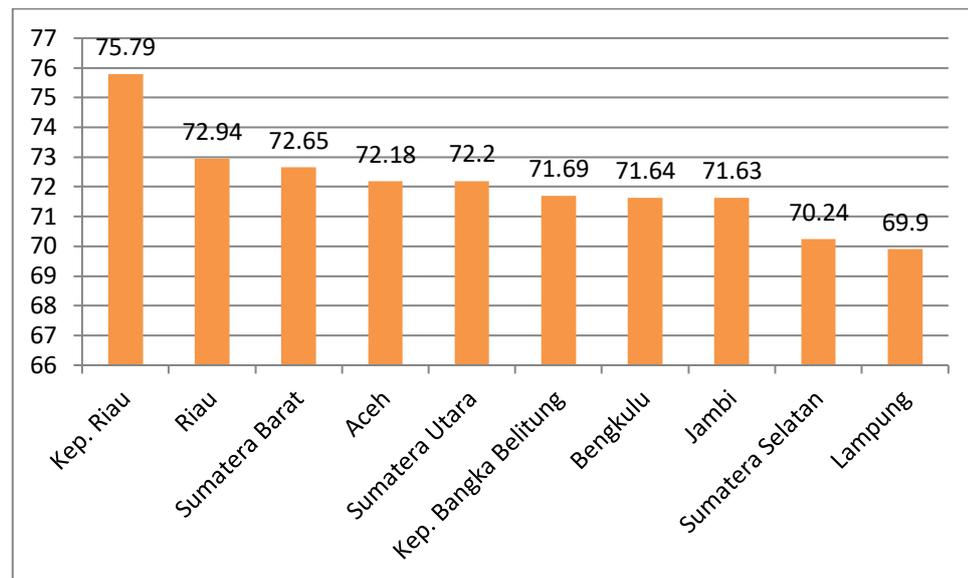
Tujuan utama pembangunan yang dilakukan pemerintah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan suatu paradigma pembangunan yang saat ini sedang dalam peningkatan yang mana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa komponen yaitu kualitas tingkat hidup penduduk suatu negara, sehingga tingkat indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui tingkat kualitas kesehatan, tingkat kualitas pendidikan, dan ekonomi (daya beli) masyarakat (Reguna, 2020).

Paradigma pembangunan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menitikberatkan pada pembangunan manusia dengan melihat tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Suatu negara dikatakan maju tidak hanya dihitung melalui aspek harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan serta proses pembangunannya melibatkan pertimbangan kemanusiaan untuk berumur panjang, sehat, dan bermental unggul dalam ilmu pengetahuan (Viana, 2022). Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia adalah IPM yang diukur melalui tingkat kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Akbar, 2016; Reguna, 2020; Prasetyo, 2019).

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan sarana publik untuk mendorong kedudukan manusia dengan meningkatkan pembangunan. Hal ini diharapkan bantuan dari pemerintah untuk mendukung

pembangunan manusia, dengan adanya bantuan tersebut maka dapat menciptakan manusia yang berkarakteristik, berkualitas, serta berpengetahuan, sehingga dengan terwujudnya realisasi tersebut maka dapat menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mendorong dan membangun pembangunan masyarakatnya (Reguna, 2020).

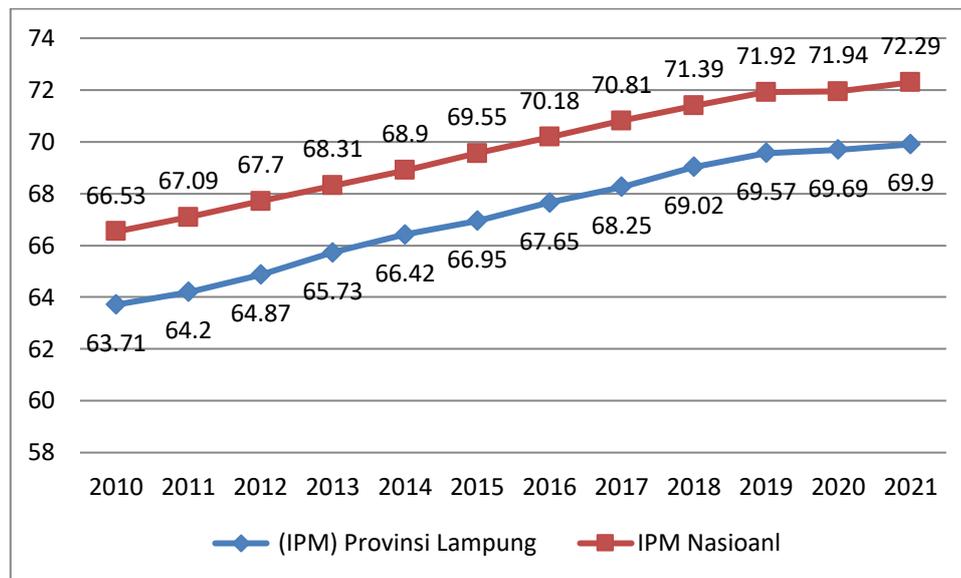
IPM dapat digunakan untuk mengkalasifikasian kondisi di Provisi lampung bahwa dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan yang dapat menikmati pendidikan selama 12,73 tahun yang setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan yang setingkat dengan diploma I. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,73 tahun, lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya, sehingga dalam meningkatkan IPM di Indonesia sangat tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan IPM di Provinsi Lampung. Berikut merupakan perkembangan IPM Pulau Sumatera tahun 2021 pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Sumatera Tahun 2021 (persen)

Sumber. Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan IPM seluruh Provinsi di Indonesia dari tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini merupakan hal yang positif bagi bangsa Indonesia dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Jika dilihat dan dibandingkan dengan tingkat IPM daerah lain, Provinsi Lampung memiliki IPM paling rendah di Pulau Sumatera. Hal ini sangat disayangkan mengingat Provinsi Lampung berdekatan dengan ibu kota yang memiliki IPM tertinggi.



Gambar 1.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional Tahun 2010-2021 (persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Lampung dari tahun 2010-2021 selalu mengalami peningkatan. Namun, IPM Provinsi Lampung masih dibawah rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2021 nilai IPM nasional mencapai 72,29%, sedangkan IPM Provinsi Lampung hanya mencapai nilai sebesar 69,90%. Pandemi Covid-19 sangat membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Lampung yang dapat dilihat dari lambatnya pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada tahun 2020 dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. IPM pada 2020 tumbuh 0,17% (hanya meningkat 0,12 poin) jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat hingga 0,21 poin. Hal ini cukup terlihat jelas perkembangan IPM di Provinsi Lampung, sehingga kondisi pertumbuhan pembangunan manusia di Indonesia masih belum merata dari setiap masing-masing Provinsi dan capaian IPM Provinsi Lampung masih sangat tertinggal jika

dibandingkan dengan capaian IPM lainnya terutama di Pulau Sumatera, disebabkan karena terjadinya suatu perbedaan dan kesenjangan dalam pencapaian IPM di provinsi Lampung yang masih tertinggal di antara wilayah perkotaan lainnya. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (perekonomian) di wilayah Lampung masih belum merata sehingga dalam hal ini perlu adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan yang khusus yang dapat berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap pembangunan manusia/modal manusia agar kualitas sumber daya manusia tetap terus tumbuh.

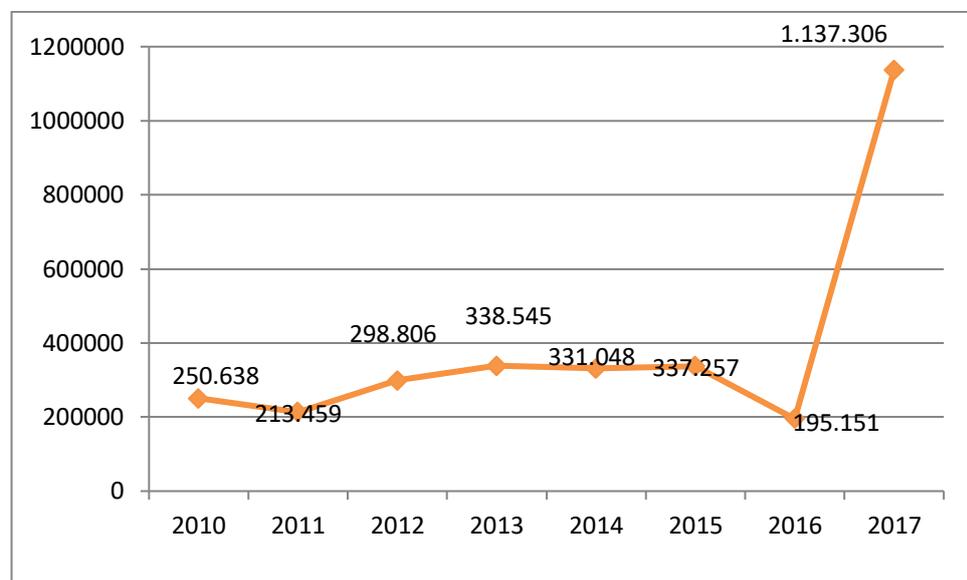
Indeks pembangunan manusia dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah serta UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menjalankan tugas pemerintahan daerah dengan mengolah penerimaan dan pengeluaran daerah, oleh karena itu setiap daerah diharapkan mampu membangun daerahnya sendiri serta memacu pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi, keanekaragaman daerah, dan peluang serta tantangan dalam persaingan global yang dapat memberikan suatu kewenangan yang sangat luas terhadap suatu daerah dengan memberikan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah negara yang diperkuat oleh UU No 32

Tahun 2014, bahwa belanja daerah sangat diutamakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas disuatu sumber kehidupan masyarakat untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dan mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga dan tolak ukur dalam kinerja serta pelayanan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai (Nurul, 2020).

Pengeluaran pemerintah (*govement expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah yang mengatur perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah di setiap tahun yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuannya untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan maemacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Handayani, 2015).

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang baik dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting. Sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai suatu pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan tercerminnya indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan perkembangan di suatu daerah dan dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada agar optimal dan efisien dengan peran alokatif. Berdasarkan data dari perimbangan keuangan nasional, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2017 yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



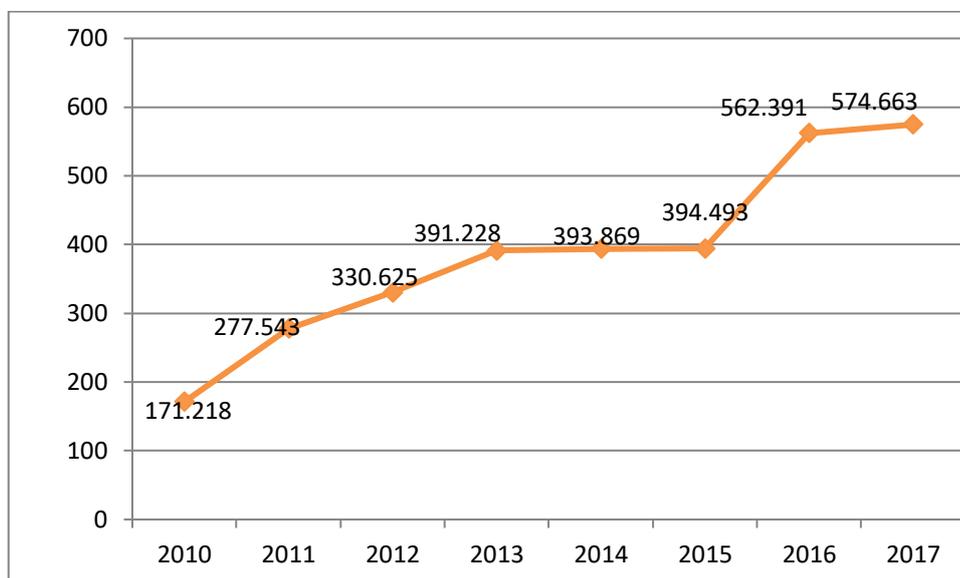
Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Tahun 2010-2017 di Provinsi Lampung (Miliar Rupiah)

sumber: Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada gambar 1.3 pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan 15%, kemudian mengalami kenaikan sampai tahun 2013 yaitu sebesar 25%, dan terjadi penurunan kembali sampai tahun 2015 yaitu turun menjadi 34%. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 43%, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang mencapai 683%. Pada penjelasan di atas bahwa pemerintah Provinsi Lampung masih belum serius

dalam menangani pendidikan dan masih kurang menyadari bahwa peran dalam bidang pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

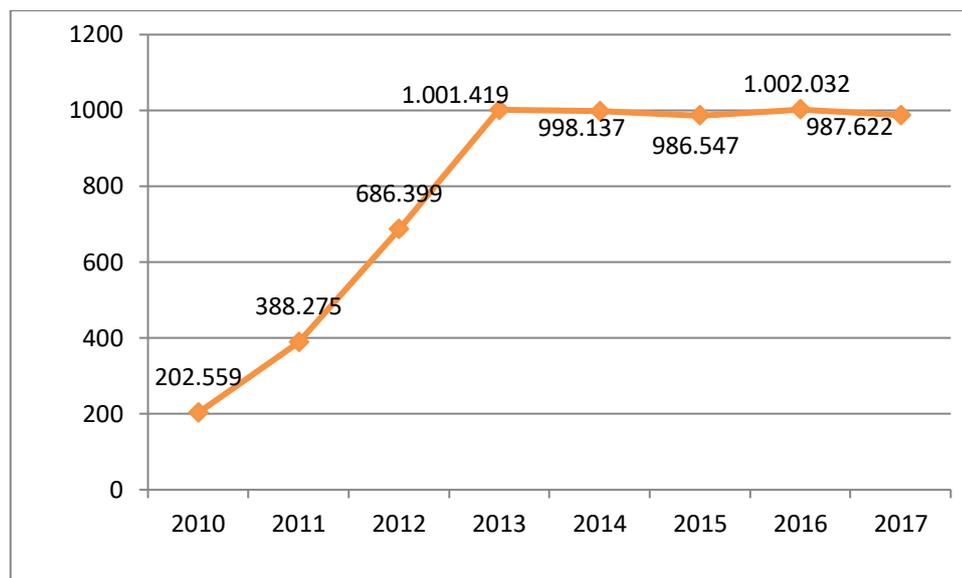
Sektor pembangunan anggaran pemerintah dapat dilokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan pada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Investasi pendidikan dalam pemerintah harus bisa membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik lagi, hal ini sangatlah dibutuhkan karena merupakan wujud dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.



Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Tahun 2010-2017 di Provinsi Lampung (Miliar Rupiah)

Sumber: Jenderal perimbangan Keuangan

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pemerintah Provinsi Lampung dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan disetiap tahun. Dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Lampung sangat serius memperhatikan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung dari tahun 2010-2017 dalam anggaran belanja pada sektor kesehatan.



Gambar 1.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur Tahun 2010-2017 di Provinsi Lampung (Miliar Rupiah)

sumber: Jenderal Perimbangan Keuangan

Dapat dilihat pada gambar 1.5 anggaran pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur Provinsi Lampung dari tahun 2010-2017 mengalami peningkatan disetiap tahun. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1%, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2015 menjadi -1%. Pada tahun 2016 kembali meningkat mencapai 2%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi -1%. Jika dilihat dari tahun 2010-2017 anggaran pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur yang mengalami peningkatan cukup tinggi ada di tahun 2013 sebesar

1,001,419 juta rupiah. Dari tahun-ketahun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi Lampung cukup memperhatikan infrastruktur dengan terus meningkatkan anggaran belanja sektor infrastruktur demi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dari fenomena pembangunan manusia di provinsi Lampung, perlu adanya kebijakan yang konkrit yang berkaitan dengan bidang maupun sektor untuk dapat memberikan dampak yang efektif terhadap pembangunan manusia, sehingga mewujudkan sumber daya manusia yang tumbuh dan berkualitas. Perbaikan modal merupakan salah satu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Modal manusia dapat mengacu pendidikan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yang mendorong kearah populasi yang sehat yaitu kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pembentukan modal manusia adalah proses peningkatan jumlah orang yang mempunyai keahlian dalam berpendidikan dan pengalaman yang menentukan dalam pembangunan ekonomi dan politik di suatu negara dengan beberapa faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Jhingan, 2014).

Salah satu perangkat yang banyak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang baik dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor publik sangat penting sehingga menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini tercermin dari indeks

pembangunan manusia yaitu investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dalam investasi ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Pengeluaran untuk bidang pendidikan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pendidikan dan fasilitas yang baik, sehingga mampu meningkatkan harapan lama sekolah. Anggaran dalam bidang kesehatan bisa dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun bisa menurunkan angka kematian ibu hamil dan anak di bawah umur sebagai salah satu tujuan dalam penentuan pembangunan manusia. Bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi yang dapat terjadi efisiensi dan pada peningkatannya akan meningkatkan konsumsi riil perkapita. Dari fenomena tersebut dan melihat pentingnya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka perlu dilakukannya analisis **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penjelasan yang ada di latar belakang, ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam pembahasan yang ditulis oleh penulis dengan permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021?

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021?
3. Bagaimana elastisitas indeks pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka adapun tujuan penelitian yang ditarik adalah:

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara persial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021.
3. Pengaruh elastisitas Indeks pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan studi ilmu pengetahuan diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung 2010-2022.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk lembaga – lembaga terkait.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah pengetahuan, informasi, dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Provinsi Lampung dengan menggunakan data sekunder yang variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta beberapa jurnal terkait.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir kuliah. Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	2022								2023																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■	■																										
2.	Penyusunan Usulan Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■																
3.	Seminar Usulan Penelitian													■															
4.	Revisi Usulan Penelitian														■	■													
5.	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■				
6.	Sidang Skripsi																									■			
7.	Revisi Skripsi																										■	■	■